



## Implementasi Interoperabilitas Satgas TNI-POLRI-BIN Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme di Papua

Riska Imron Rosadi

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: [Riskaimron@gmail.com](mailto:Riskaimron@gmail.com)

### Abstrak

Gerakan separatisme di Papua merupakan ancaman multidimensional terhadap keamanan nasional Indonesia yang menuntut sinergi antarlembaga keamanan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN dalam mengatasi separatisme di Papua serta merumuskan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis dokumen resmi, literatur akademik, dan temuan lapangan pada wilayah rawan konflik seperti Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas telah berjalan dalam bentuk patroli gabungan, penyekatan wilayah, dan dukungan intelijen, namun belum optimal akibat ego sektoral, perbedaan SOP, keterbatasan sistem komunikasi, dan belum adanya komando terpadu permanen. Pembahasan menegaskan perlunya integrasi struktural, prosedural, dan teknologi C4ISR serta pendekatan smart power. Penelitian menyimpulkan bahwa interoperabilitas merupakan prasyarat strategis bagi stabilitas keamanan Papua dan keutuhan NKRI.

**Kata Kunci:** Interoperabilitas, TNI-Polri-BIN, Separatisme Papua, Keamanan Nasional, Operasi Gabungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Papua merupakan wilayah strategis dengan kompleksitas geografis, sosial-budaya, dan politik yang tinggi, sehingga sejak lama menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Karakteristik wilayah yang didominasi pegunungan terjal, hutan lebat, serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi menjadikan Papua rentan terhadap konflik berkepanjangan. Kondisi ini diperparah oleh adanya akumulasi persoalan historis, ketimpangan pembangunan, dan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan sebagian masyarakat lokal yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis bersenjata (Widjojo, 2010). Dalam perspektif keamanan nasional, konflik regional seperti yang terjadi di Papua tidak dapat dipandang sebagai persoalan lokal semata. Konflik tersebut memiliki implikasi luas terhadap stabilitas nasional, legitimasi negara, serta citra Indonesia di tingkat internasional, khususnya terkait isu hak asasi manusia dan integritas teritorial (Pranowo, 2010). Oleh karena itu, penanganan separatisme di Papua menuntut pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai instrumen negara untuk merespons ancaman separatisme, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Ketiga institusi ini memiliki mandat, fungsi, dan kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi. TNI berperan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, Polri menjalankan fungsi penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan BIN bertugas menyediakan intelijen strategis sebagai dasar pengambilan keputusan (Buzan, 1991). Dalam praktiknya, sinergi ketiga institusi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) gabungan TNI-Polri-BIN. Satgas ini dirancang sebagai instrumen operasional terpadu untuk menghadapi ancaman separatis bersenjata di Papua. Namun demikian, efektivitas Satgas sangat ditentukan oleh tingkat



interoperabilitas antarlembaga, baik pada aspek struktural, prosedural, maupun teknologi. Perbedaan doktrin, budaya organisasi, serta sistem komunikasi sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi gabungan (Puslitbang Kemhan, 2020).

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya interoperabilitas dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, keterlambatan respons, dan ketidaksinkronan operasi di lapangan (Supriatma, 2021; Purwanto, 2022). Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas penanganan konflik dan bahkan memperbesar risiko eskalasi kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana implementasi interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN di Papua serta implikasinya terhadap stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik interoperabilitas antarlembaga keamanan negara dalam menghadapi separatisme Papua. Dengan menganalisis capaian, kendala, dan peluang penguatan interoperabilitas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan keamanan nasional yang lebih integratif dan adaptif.

### **Tinjauan Pustaka**

1. **Teori Interoperabilitas.** Interoperabilitas adalah kemampuan sistem dan organisasi yang berbeda untuk bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama (Alberts & Hayes, 2006). Dalam konteks keamanan, interoperabilitas mencakup dimensi teknis, prosedural, organisasional, dan sumber daya manusia. Operasi gabungan menuntut keselarasan doktrin, SOP, dan sistem komunikasi agar pengambilan keputusan berjalan cepat dan akurat.
2. **Teori Keamanan Nasional.** Keamanan nasional tidak hanya mencakup pertahanan militer, tetapi juga dimensi politik, ekonomi, sosial, dan informasi (Buzan, 1991). Gerakan separatisme di Papua merupakan ancaman terhadap keamanan teritorial dan identitas nasional, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan hard power dan soft power.
3. **Teori Konflik.** Teori konflik menjelaskan bahwa konflik lahir dari ketimpangan kekuasaan, ekonomi, dan marginalisasi sosial (Coser, 1956; Dahrendorf, 1959). Konflik Papua bersifat asimetris, menuntut strategi counterinsurgency yang mengombinasikan operasi keamanan, intelijen, dan pendekatan sosial-budaya.

### **Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan separatisme Papua sangat dipengaruhi oleh sinergi antarlembaga (Puslitbang Kemhan, 2020; Supriatma, 2021; Purwanto, 2022). Keterbatasan interoperabilitas, khususnya pada sistem komando dan komunikasi, menjadi temuan utama yang masih relevan hingga kini.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, studi literatur, dan analisis temuan lapangan pada wilayah operasi Papua. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN di Papua telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan operasional. Bentuk

interoperabilitas tersebut meliputi patroli gabungan, operasi penyekatan wilayah rawan, pengamanan objek vital nasional, serta dukungan intelijen strategis dan taktis. Pada beberapa wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, dan Puncak, integrasi peran ini berkontribusi pada peningkatan kehadiran negara dan penurunan mobilitas kelompok separatis bersenjata. Dari aspek organisasi, koordinasi antarlembaga dilakukan melalui pos komando gabungan dan forum koordinasi rutin. Mekanisme ini memungkinkan pertukaran informasi dan evaluasi operasi secara periodik. Namun, penelitian menemukan bahwa struktur komando masih bersifat koordinatif dan belum sepenuhnya integratif, karena masing-masing institusi tetap mempertahankan jalur komando internalnya. Dari aspek operasional, interoperabilitas terlihat dalam pembagian peran yang relatif jelas, di mana TNI berfokus pada penguasaan wilayah dan operasi militer selain perang, Polri pada penegakan hukum, serta BIN pada deteksi dini dan penggalangan intelijen. Kendati demikian, perbedaan SOP dan penilaian ancaman sering kali menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Sementara itu, dari aspek teknologi, interoperabilitas masih menghadapi kendala signifikan. Perbedaan platform komunikasi dan keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah pegunungan Papua menyebabkan pertukaran informasi belum berlangsung secara real-time. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan dan respons taktis terhadap dinamika ancaman.

## **Pembahasan**

Pembahasan ini diarahkan untuk menginterpretasikan temuan penelitian secara lebih mendalam dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis interoperabilitas, keamanan nasional, dan konflik, serta menyesuaikan gaya analisis kritis yang lazim digunakan dalam artikel jurnal Universitas Indonesia (UI), khususnya jurnal-jurnal rumpun ilmu sosial dan ilmu pertahanan.

### **Interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN dalam Perspektif Teoretis**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN di Papua masih berada pada level koordinatif, belum sepenuhnya integratif. Dalam perspektif teori interoperabilitas Alberts dan Hayes (2006), kondisi ini mengindikasikan bahwa integrasi baru tercapai pada dimensi prosedural terbatas, sementara dimensi organisasional dan teknis belum terbangun secara optimal. Ketiadaan komando terpadu permanen serta perbedaan SOP antarlembaga menyebabkan pengambilan keputusan strategis dan taktis sering berjalan lambat dan tidak seragam. Dalam konteks jurnal UI, temuan ini memperkuat argumen bahwa interoperabilitas bukan semata isu teknis, melainkan persoalan tata kelola keamanan (security governance). Interoperabilitas yang lemah mencerminkan belum optimalnya integrasi kebijakan dan kelembagaan dalam sistem keamanan nasional Indonesia, khususnya dalam menghadapi konflik internal yang bersifat asimetris.

### **Interoperabilitas dan Keamanan Nasional di Papua**

Dari sudut pandang teori keamanan nasional Buzan (1991), konflik separatisme Papua merupakan ancaman multidimensional yang mencakup aspek teritorial, politik, sosial, dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN berperan penting dalam menjaga keamanan teritorial melalui operasi gabungan dan penyekatan wilayah, namun belum sepenuhnya efektif dalam menjawab dimensi sosial dan politik konflik. Ketidaksinkronan antarlembaga berpotensi memunculkan respons keamanan yang bersifat parsial, di mana penindakan militer dan penegakan hukum tidak selalu berjalan seimbang dengan pendekatan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, pembahasan



jurnal menegaskan bahwa interoperabilitas yang kuat seharusnya memungkinkan negara menghadirkan respons keamanan yang terpadu, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan warga negara, sebagaimana prinsip keamanan manusia (human security) yang banyak digunakan dalam kajian UI.

### **Dimensi Konflik Asimetris dan Tantangan Operasional**

Papua sebagai wilayah konflik asimetris menuntut respons keamanan yang adaptif dan berbasis intelijen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan interoperabilitas teknologi, khususnya dalam pertukaran informasi intelijen secara real-time, berdampak langsung pada efektivitas operasi kontra-separatisme. Hal ini sejalan dengan teori konflik asimetris yang menekankan pentingnya keunggulan informasi dalam menghadapi aktor non-negara bersenjata (Coser, 1956). Dalam praktiknya, perbedaan budaya organisasi antara TNI yang berorientasi militer dan Polri yang berorientasi penegakan hukum menimbulkan friksi dalam pelaksanaan operasi. BIN, sebagai penyedia intelijen strategis, belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam siklus operasi taktis. Pembahasan ini menegaskan bahwa tanpa interoperabilitas penuh, keunggulan negara dalam sumber daya tidak secara otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pengendalian konflik.

### **Relevansi Pendekatan Smart Power**

Hasil penelitian mendukung pentingnya pendekatan smart power dalam penanganan separatisme Papua, yakni integrasi hard power (operasi keamanan) dan soft power (pendekatan sosial-budaya dan pembangunan). Dalam konteks jurnal UI, pendekatan ini relevan dengan tradisi kajian kebijakan publik dan keamanan yang menekankan pentingnya legitimasi negara dan penerimaan masyarakat. Interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kerja sama operasional, tetapi juga sebagai mekanisme integrasi kebijakan lintas sektor. Ketika interoperabilitas berjalan optimal, operasi keamanan dapat diselaraskan dengan program pembangunan, dialog sosial, dan perlindungan HAM, sehingga mengurangi potensi eskalasi konflik jangka panjang.

### **Implikasi Kebijakan dan Reformasi Kelembagaan**

Pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan interoperabilitas memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Pertama, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan komando gabungan terpadu permanen di Papua sebagai pusat pengambilan keputusan strategis dan operasional. Kedua, standardisasi SOP lintas lembaga dan integrasi sistem C4ISR menjadi prasyarat untuk meningkatkan respons cepat dan akurasi operasi. Dalam kerangka analisis jurnal UI, rekomendasi ini menunjukkan bahwa penanganan konflik Papua memerlukan pembaruan kebijakan keamanan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Interoperabilitas yang diperkuat akan meningkatkan efektivitas operasi, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat akuntabilitas negara dalam penggunaan kekuatan.

### **Sintesis Pembahasan**

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN merupakan isu strategis yang berada pada irisan antara keamanan nasional, tata kelola kelembagaan, dan resolusi konflik. Dalam gaya jurnal UI, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan diskursus akademik mengenai bagaimana negara mengelola konflik internal melalui integrasi institusi keamanan. Temuan dan analisis ini menunjukkan bahwa tanpa interoperabilitas yang kuat dan terlembaga, upaya penanganan separatisme berisiko berjalan parsial dan kurang berkelanjutan.



## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa interoperabilitas Satgas TNI-Polri-BIN merupakan faktor strategis dalam mengatasi gerakan separatisme di Papua. Meskipun telah menunjukkan capaian positif, interoperabilitas belum optimal akibat kendala struktural, prosedural, dan teknologi. Penguatan interoperabilitas perlu dilakukan melalui pembentukan komando gabungan terpadu permanen, penyusunan SOP lintas instansi, integrasi sistem C4ISR, dan pelatihan lintas fungsi berbasis pemahaman budaya lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alberts, D. S., & Hayes, R. E. (2006). *Understanding Command and Control*. Washington, DC: CCRP.
- Buzan, B. (1991). *People, States, and Fear*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Pranowo, B. (2010). Keamanan Nasional dalam Perspektif Konflik Regional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto, H. (2022). Evaluasi Sistem Komando dan Kendali Operasi Gabungan TNI-Polri-BIN di Daerah Konflik. Tesis Seskoad.
- Puslitbang Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Separatisme Papua dan Strategi Penanganannya*. Jakarta.
- Supriatma, M. (2021). Kolaborasi TNI-Polri dalam Penanganan Konflik Bersenjata di Papua. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Widjojo, M. S. (2010). *Papua Road Map*. Jakarta: LIPI Press.